

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alder, John and Peter English, 1989, *Constitutional and Administrative Law*, Macmillan, London.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asrun, A. Muhammad, 2004, *Krisis Pengadilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, dalam Mahkamah Konstitusi, Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi RI*, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhary, Tahir, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Bahar, Saefrudin, dkk., 1992, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, Setneg Republik Indonesia, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Daman, Rozikin, 1993, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dicey, A.V, 1959, *Introduction To The Study of The Law of The Constitution*, Macmillan Education, London.

- Ducat, Craig R, 2009, *Constitutional Interpretation*, Wadsworth Cengage Learning, United States.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Insignia Strat, Yogyakarta.
- El Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Fadjar, Abdul Mukti, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konpress dan Citra Media, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Faiz, Elza, dkk., 2013, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Model dan Pertumbuhan Konstitusi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gamer, Bryan A, 2004, *Black's Law Dictionary*, West, Texas.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Hady, Nuruddin, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.R, Syauckani, dkk., 2001, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul dan Naziyah, R, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Komisi Yudisial, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

- Kusnardi, Mohammad, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Lev, Daniel S, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta.
- Luzt, Donald S, 2006, *Principle of Constitutional Design*, Cambridge University Press, Priceton, New Jersey.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku VI: Kekuasaan Kehakiman)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Laica, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Grup, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Muchan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Phillips, O. Hood, 2001, *Constitutional and Administrative Law*, Sweet&Maxwell, London.
- Riza, Marwati, 2018, *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Kepaniteraan dan Setjen Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Santoso, Mas Achmad, 2004, *Pembaharuan Hukum Indonesia: Agenda Yang Terabaikan*, Melibas, Jakarta.
- Saragih, Bintan Regen, 2018, *Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2000 Buku Lima*, Setjen MPR RI, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*, Setjen MPR RI, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000*, Setjen MPR RI, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Suhelmi, Ahmad, 2001, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Gramedia, Jakarta.

Surowidjojo, Arief T, 2004, *Pembaharuan Hukum: Kumpulan Pemikiran Alumni FHUI*, Iluni FH-UI, Jakarta.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Tobing, Jakob, 2008, *Membangun Jalan Demokrasi: Kumpulan Pemikiran Jakob Tobing Tentang Perubahan UUD 1945*, Konpress, Jakarta.

Tohari, A. Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

B. JURNAL

Chaidir Ellydar dan Suparto, 2017, "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat dan Kehormatannya", *UIR Law Review Volume 01 Nomor 02*, Riau.

Goesniadhie, Kusnu, 2007, "Prinsip Independensi Hakim", *Jurnal Hukum Vol. 14 No. 3*, Jakarta.

KRHN, ICEL dan LeIP, 2000, Position Paper: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, ICEL dan LeIP, Jakarta.

Marzuki, M Laica, 2006, "Komisi Yudisial dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi Vol. VI No. 2*, Jakarta.

MD, Mahfud, 2009, "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16*, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2014, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Inovatif Vol VII Nomor III*, Jakarta.

Suparman, Eman, 2011, "Pengawasan Hakim Bermartabat Melampaui Normativitas: Sebuah Format Ideal Komisi Yudisial", *Buletin Komisi Yudisial Republik Indonesia Vol. 5 No. 5*, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2012, "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2*, Surabaya.

C. Laporan Penelitian

Mochtar, Zainal Arifin, 2012, *Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan UUD 1945*, Disertasi, Program Doktor, Sekolah Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada.

Mulyosudarmo, Suwoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan)*, Disertasi, Program Doktor, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Soleh, Imam Anshori, 2013, *Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim*, Disertasi, Program Doktor, Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Suhendro, Yosapath Bambang, 2008, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Tesis, Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

D. Makalah

Janedri, M. Gaffar, 2009, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Makalah*, Surakarta.

Marzuki, Suparman, 2011, Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan yang Bersih, *Makalah Seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*, Kerjasama Komisi Yudisial dengan PUSHAM-UII, Medan.

E. Artikel

Isnaldi, 2013, *Artikel: Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal Terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia*, FH UI, Depok.

Santoso, Mas Achmad, 2005, *Artikel: Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial*, Kompas, Jakarta.

F. Internet

A.R, M. Taufiq, “Administrasi Negara Di Masa Lampau”, Academia.edu diakses pada 20 Desember 2019.

Damang, “Teori Pengawasan”, <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html> , diakses 4 September 2019.

Muqoddas, Busro, 2006, “Membangun Komitmen Multi Pihak Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Mandiri, Profesional dan Berwibawa” disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya di Komisi Peradilan Perdamiaan dan Keutuhan Lingkungan Hidup Keuskupan Maumere 10 November 2006, <http://www.komisiyudisial.go.id> , diakses 19 Februari 2020.

G. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keppres Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

H. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-IV/2006.

I. Lain-Lain

Preamble The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.